**PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN MENGGUNAKAN
BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MASYARAKAT DESA**

***THE EMPOWERMENT OF WOMEN GROUPS USING THE VILLAGE-OWNED
ENTERPRISE IN INCREASING VILLAGE COMMUNITY INCOME***

Saftri Endah Winarti, Herawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Jl. Timoho No 317, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta
E-mail: saftriendahwinarti@apmd.ac.id

Fajar Sidik

Program Studi Kebijakan Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No 1, Karangmalang, Yogyakarta
E-mail: fajarsidik@uny.ac.id

Diterima: 25 September 2019, Direvisi: 12 Maret 2020; Disetujui: 14 April 2020

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kemitraan antara kelompok perempuan (PKK) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) oleh Pemerintah Desa Ponggok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena pendirian dan pengembangan BUM Desa setelah kebijakan dana desa ditetapkan mulai tahun 2014 pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya dalam beberapa tahun berjalan, jumlah BUM Desa yang berdiri meningkat signifikan, namun banyak BUM Desa yang tidak mampu aktif dan produktif dalam menjalankan bisnis usaha. Desa Ponggok menjadi desa berprestasi dan percontohan nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, sehingga dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk dipelajari lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, BUM Desa dipahami dengan menggunakan teori *social enterprise* sesuai dengan kedudukan, peran, dan fungsinya sebagai lembaga sosial-ekonomi di pedesaan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Dalam kegiatan eksplorasi permasalahan, data primer dan sekunder dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dan sekunder yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, tim peneliti dalam penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) berbasis BUM Desa dalam mengembangkan bisnis usaha kecil produk lokal khas desa di area desa wisata telah mampu meningkatkan pendapatan tambahan bagi kelompok-kelompok perempuan, namun faktanya menunjukkan hasil keuntungan bisnis usaha yang diperoleh masih cenderung didominasi oleh PKK induk (pusat) dari pada kelompok-kelompok perempuan yang dibina di tingkat paling bawah. Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan/perbaikan bagi Pemerintah Desa Ponggok agar melakukan pemberdayaan masyarakat dari akar rumput, sehingga optimalisasi upaya untuk mereduksi masalah kemiskinan di pedesaan dapat diakselerasi dengan tindakan kongkret dan tepat sasaran.

Kata Kunci : *pemberdayaan, kelompok perempuan, BUM Desa, kesejahteraan sosial, social enterprise, desa ponggok.*

Abstract

This article aims to explain the obstacles in implementing partnerships between women's groups (PKK) and Village-Owned Enterprises (BUM Desa) by the Ponggok Village Government to improve the welfare of the community in Ponggok Village, Klaten Regency. Qualitative research with a case study method approach is used to explore problems that occur in the field. This research is motivated by the phenomenon of the establishment and development of BUM Desa after the village funding policy was set to begin in 2014 during the administration of President Jokowi. In just a few years running, the number of BUM Desa that stands significantly increased, but many BUM Desa are unable to be active and productive in running a business. Ponggok Village has become a village of achievement and national pilot designation designated by the Central Government so that it is used as a research location for further study. In the context of this study, BUM Desa is understood by using Social Enterprise theory in accordance with its position, role and function as a socio-economic institution in rural areas. The study was conducted qualitatively with the case study approach method. In problem exploration activities, primary and secondary data are collected using interview, observation, and documentation techniques. Primary and secondary data obtained are then analyzed using qualitative data analysis techniques according to Miles and Huberman. Based on the results of data analysis that has been done, the research team in this study can conclude that the empowerment of BUM Desa-based women groups (PKK) in developing small businesses that are typical local products of villages in the tourist village area has been able to increase additional income for women's groups, however, the fact is that the results of the business profits obtained still tend to be dominated by the parent PKK (central) rather than the groups of women fostered at the lowest level. The recommendations that can be given from this research are: the results of this study can be used as input/improvements for the Ponggok Village Government to empower communities from the grassroots so that the optimization of efforts to reduce the problem of poverty in rural areas can be accelerated with concrete and targeted actions.

Keywords: *empowerment, women's group, BUM Desa, social welfare, social enterprise, ponggok village.*

PENDAHULUAN

Sejak kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan oleh pemerintah pusat, transformasi pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dari berbasis komunitas menjadi berbasis kelembagaan formal (BUM Desa). Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) telah melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas melalui PNPM Pariwisata Desa untuk mengembangkan desa wisata alam sejak tahun 2009-2014 membentuk 1500-an unit desa wisata dengan jumlah total anggaran mencapai Rp 406 Milyar (Kementerian Pariwisata, 2014). BUM Desa diperkenalkan tahun 2009 oleh pemerintah pusat di bawah masa Presiden SBY, namun belum menjadi prioritas. Setelah Presiden SBY diganti Presiden Joko Widodo-Kalla, BUM Desa dijadikan sebagai prioritas pemerintah pusat untuk pembangunan di wilayah perdesaan.

Secara konseptual, BUM Desa memiliki peran dan fungsinya secara ekonomi dan sosial dapat dimaknai sebagai lembaga *social enterprise* (Borgaza, Galera, & Nogales, 2008) yang dapat digunakan sebagai instrumen pembangunan di pedesaan untuk menyelesaikan masalah sosial-kemiskinan (Eversole, Barraket, & Luke, 2014).

UNDP dan EMES European Research Network mendefinisikan *social enterprises* yaitu “*may be defined as private, autonomous, entrepreneurial organizations providing goods or services with an explicit aim to benefit the community. They are owned or managed by a group of citizens, and the material interest of capital investors is subject to limits. Social enterprises place a high value on their autonomy and on economic risk-taking related to ongoing socioeconomic activity. Social enterprises are either prohibited legally from distributing profits, or are structured in order to exclude profit as the main goal* (Borgaza dkk, 2008).

EMES European Research Network telah menjelaskan dua kriteria utama *social enterprise* yaitu dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi, meliputi; (1) *a continuous activity, producing and selling goods and/or services*, (2) *a high degree of autonomy*, (3) *a significant level of economic risk*, dan (4) *A minimum amount of paid work*. Dimensi sosial, meliputi; (1) *an explicit aim to benefit the community*, (2) *an initiative launched by a group of citizens*, (3) *decision-making power not based on capital ownership*, (4) *a participatory nature, which involves the various parties affected by the activity*, dan (5) *limited profit distribution* (Nyssens, Adam, & Johnson, 2006).

Dalam konteks Indonesia, suatu lembaga/ organisasi dapat dikatakan sebagai wadah *social enterprise* jika memenuhi “kriteria dasar”, antara lain; *social mission/goal, empowerment, ethical bussiness principles, social impact, dan sustainability* (Hariyanti, Hati, Wirastuti, & Susanto, 2015). UNDP menjelaskan *social enterprise* dapat mengkaselerasi pembangunan di wilayah pedesaan/*rural* karena terciptanya kerjasama antara negara, masyarakat, dan swasta dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis usaha komersial (barang dan jasa) sekaligus kontribusi terhadap upaya menyelesaikan masalah social. Dengan kegiatan tersebut, *social enterprise* berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi-sosial di wilayah pedesaan, antara lain; menyediakan layanan dasar (kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan) bagi warga desa miskin, mendayagunakan sumber daya lokal desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai aktor, mendorong terciptanya pemerintahan inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang kurang mampu, dan meningkatkan modal sosial di tingkat lokal (Borgaza dkk., 2008).

BUM Desa dapat dikatakan sebagai *social enterprise* karena BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan publik, dan berbagai usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan sosial masyarakat Desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal 5 Ayat 3).

BUM Desa dijadikan sebagai lembaga *social enterprise* yang menjalankan bisnis usaha desa untuk pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi dari keuntungan bisnis usaha yang dihasilkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah pedesaan. BUM Desa difungsikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan (Sidik & Nasution, 2018). Prabowo telah menunjukkan bahwa unit usaha keuangan mikro yang dikelola BUM Desa dapat membantu keluarga miskin (Prabowo, 2014). Di Desa Pekraman (Kota Denpasar), BUM Desa dan pedagang di Pasar Desa saling menguntungkan dan menguatkan dalam menjalankan bisnis simpan pinjam (Wiagustini, 2015). BUM Desa dapat menjalankan bisnis usaha simpan-pinjam berbasis modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Purwakerti (Kabupaten Karangasem) (Suastika, 2017). Di Desa Bleberan (Kabupaten Gunungkidul), BUM Desa

sebagai lembaga sosial-ekonomi di pedesaan sebagai wadah modal sosial untuk kolektivitas kelompok usaha (Sidik, 2015), meskipun secara internal kelembagaan BUM Desa terjadi konflik dalam pengelolaan pendapatan berbagai usaha desa (Sidik, Raharjo, & Parwoto, 2018) karena terjadi inefisiensi dalam realisasi pendapatan yang diperoleh dari usaha desa wisata (Sidik, 2017).

Sementara itu, kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial berdasarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam kebijakan tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Pasal 1 Ayat 2). Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan

6. Meningkatkan kualitas manajemen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (pasal 3).

Lembaga sosial ekonomi (BUM Desa) dapat difungsikan sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan pemberdayaan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas di desa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. BUM Desa menjadi wadah kolektivitas usaha bersama warga desa yang mensinergikan berbagai potensi lokal desa dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan mengatasi permasalahan sosial di desa/kelurahan. Pemberdayaan sosial dilakukan pemerintah desa sebagai upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga desa yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat 10).

Dalam menjalankan fungsinya, BUM Desa menjadi wadah produktif warga desa bersama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Buktinya, BUM Desa telah mampu menunjukkan manfaat ekonomi-sosial secara langsung dan tidak langsung di Desa Tamansari, Kabupaten Banyuwangi (Setyobakti, 2017). Dalam menjalankan berbagai jenis usaha, BUM Desa mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cagak (Kabupaten Subang), (Sumaryadi & Saputra, 2017). Tidak hanya secara sosial dan ekonomi, BUM Desa juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari berbagai usaha bisnis yang dijalankan di Desa Rawang Pasar V dan Air Joman Baru (Sumatera Utara), (Suriadi, Rudjiman, Mahalli, Achmad, & Muda, 2015), dan Desa Ketindan, Wonorejo, dan Gondowangi di Malang (Hardijono, Maryunani, Yustika, & Ananda, 2014).

Di bawah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUM Desa dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan usaha desa wisata alam dengan Dana Desa (Viva, 2016). Dari tahun 2015-2019, Dana Desa diberikan kepada 74.958 oleh Pemerintah Pusat dengan rata-rata sebesar Rp 1 Milyar setiap desa (Kementerian Keuangan, 2018). Kementerian Desa mendorong agar Dana Desa dimanfaatkan untuk mendirikan dan mengembangkan BUM Desa sebagai upaya mengakselerasi dalam mereduksi kemiskinan desa (Kompas, 2015). Sebab, Kementerian Desa mencatat jumlah desa tertinggal mencapai 40-45 persen dari total 74.958 desa (Kompas, 2017a).

Hanya dalam kurun waktu dua tahun berjalan, BUM Desa meningkat signifikan, yaitu dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 21,811 unit pada tahun 2017 (Kompas, 2017b; The Jakarta Post, 2017a). BUM Desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dan berkomitmen membentuk 40.000 unit BUM Desa (Kompas, 2015). Namun, masalah utama yang dihadapi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak BUM Desa (sekitar 65 persen dari jumlah total 12.848 unit pada tahun 2016 yang telah berdiri) belum mampu aktif-produktif, normatif, dan formalitas (Yulianto, 2017). Dilatarbelakangi permasalahan serius ini, penelitian kemudian dilakukan pada BUM Desa di Desa Ponggok.

BUM Desa di Desa Ponggok dijadikan sebagai lokasi penelitian karena menjadi desa percontohan nasional (Kompas, 2016; The Jakarta Post, 2017b) dalam pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Pusat (Tempo, 2017). Banyak peneliti terdahulu mencermati BUM Desa Ponggok dari berbagai aspek dan sudut pandang. Para peneliti terdahulu tersebut mencermati aspek kajian, sebagai berikut: (1) BUM Desa secara konseptual dapat disebut sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola

unit usaha berupa umbul ponggok (sumber daya milik bersama) untuk pemberdayaan masyarakat desa (Sidik, Abisono, & Herawati, 2018), (2) strategi pengembangan BUM Desa dalam mengelola unit usaha wisata pemandian umbul ponggok (Danaresa & Herawati, 2018), (3) strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUM Desa (Nursetiawan, 2018), strategi BUM Desa dalam mengelola objek wisata umbul ponggok (Apriyani, 2016), partisipasi pemuda dalam mengembangkan unit usaha BUM Desa (Kasila & Kolopaking, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, tim peneliti mencoba mencermati aspek kemitraan antara BUM Desa dengan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan produk pangan lokal khas desa dan unit usaha desa wisata pemandian umbul ponggok. Berdasarkan literatur review di atas, tim peneliti mencermati aspek tersebut untuk mengisi *gap* dan menjadikannya sebagai *State of The Art* (kebaruan) dari hasil penelitian oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini sangat penting dilakukan di Desa Ponggok sebagai salah satu desa terbaik dan percontohan nasional karena mendapat kritik yang mendasar terhadap tujuan idealnya (Sidik, Nasution, & Herawati, 2018), sehingga perlu dilakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap aspek yang diteliti disini untuk mengungkap dinamika yang terjadi di lapangan.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu; bagaimana pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) berbasis Badan Usaha Milik Desa sebagai *social enterprise* di Desa Ponggok dilakukan? dan apa kendala yang dihadapi BUM Desa Ponggok sebagai lembaga *social enterprise* dalam pemberdayaan sosial kepada kelompok perempuan (PKK)?

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pelaksanaan strategi kemitraan antara

kelompok perempuan (PKK) dan Badan Usaha Milik Desa sebagai *social enterprise* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat diketahui proses- mekanisme kerja dan kendala yang dihadapi.

Kontribusi hasil penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran dan arah perbaikan bagi BUM Desa-BUM Desa di seluruh Indonesia agar mampu aktif-produktif dalam pemberdayaan masyarakat desa, terutama pada aspek pemberdayaan sosial bagi kelompok-kelompok perempuan (PKK) guna mendorong mewujudkan ketahanan sosial bagi mereka yang rentan/miskin di pedesaan agar mampu hidup lebih layak/sejahtera.

Ketahanan sosial yang dimaksud disini adalah suatu kondisi kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik yang telah mengelilinginya. Suatu komunitas memiliki tingkat ketahanan sosial bila: pertama, mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang pengaruh atas perubahan sosial yang telah terjadi. Kedua, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. Ketiga, mampu mengembangkan mekanisme kerja yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (Syawie, 2007). Ketahanan sosial semacam ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya potensi lokal dan aset lokal untuk pemberdayaan masyarakat desa (Mughtar, 2012) menggunakan organisasi sosial lokal yang terlembaga sebagai wadah kerjasama warga untuk pembangunan kesejahteraan sosial (Sitepu, 2017), dalam konteks ini: BUM Desa.

METODE

Tim peneliti secara mendalam mengeksplorasi pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan

produk pangan lokal khas desa melalui badan usaha milik desa sebagai wadah *social enterprise* di Desa Ponggok. Desa Ponggok dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan akademis bahwa BUM Desa yang ada merupakan salah satu percontohan nasional dalam pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Pusat. Dalam proses penelitian, tim peneliti menggunakan penelitian kualitatif (Moleong, 2002) dengan metode studi kasus (Yin, 2012) karena dirasa relevan dan tepat untuk mengeksplorasi masalah lebih terperinci, mendalam, dan kontekstual (Bungin, 2006) sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.

Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Observasi dilakukan pada desa wisata Umbul Ponggok, home industri, dan tempat pemasaran produk. Wawancara dilakukan dengan stakeholder yang terlibat aktif dalam pemberdayaan perempuan; Perangkat Desa, BPD, Pengurus BUM Desa, Karyawan BUM Desa, Para Pedagang Umbul Ponggok, dan Kelompok Perempuan (PKK). Data sekunder yang digunakan meliputi: jurnal publikasi, peraturan perundang-undangan (UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Permendes No 4 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang BUM Desa, Peraturan Desa Ponggok tentang BUM Desa Tirta Mandiri, AD/ART BUM Desa Tirta Mandiri, RPJMDes, dan Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tirta Mandiri (2014-2016), dan monografi Desa Ponggok. Penelitian dilakukan mulai Februari-Juni 2019.

Data primer dan sekunder yang diperoleh diatas kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif menurut (Miles & Huberman, 1994) dengan tiga tahapan, yaitu; *data reduction, data display, dan conclusion/kesimpulan*. Setelah data tersebut dianalisis, uji keabsahan data dilakukan menggunakan teknik

triangulasi (Moleong, 2002) dengan mengecek kembali antara hasil analisis data primer dan sekunder agar saling mendukung-menguatkan satu dengan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Desa dan BUM Desa di Desa Ponggok

Pemerintah Desa Ponggok membentuk BUM Desa sejak tahun 2009. Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD dan melibatkan unsur tokoh masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa telah sepakat mendirikan BUM Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2009 dengan nama BUM Desa Tirta Mandiri untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset desa. Tepatnya 15 Desember 2009, BUM Desa Tirta Mandiri resmi mengelola usaha Pelayanan Air Bersih (PAB) dan Keuangan Mikro (Simpan-Pinjam).

Pada tahun 2009, pembentukan BUM Desa didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan UU No 8 tahun 2005, pada BAB VII bagian kelima mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Tindaklanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Setelah PP No 72 tahun 2005 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang BUM Desa untuk dijadikan pedoman bagi desa-desa di wilayah Klaten, salah satunya Pemerintah Desa Ponggok.

Pada tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, BUM Desa Tirta

Mandiri kemudian menyesuaikan dasar hukum yang diberlakukan, yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa. Ketika masyarakat Indonesia ramai membicarakan pembentukan atau mengembangkan BUM Desa dengan Dana Desa, Pemerintah Desa Ponggok melakukan komunikasi untuk menegosiasikan dengan kelompok sadar wisata yang mengelola pemandian umbul ponggok agar dikelola di bawah manajemen BUM Desa.

Desa Ponggok merupakan salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas desa; sebelah Utara (Ds. Cokro, Kecamatan Tulung), sebelah Timur (Ds. Nganjat, Kecamatan Polanharjo), sebelah Selatan (Ds. Njeblog, Kecamatan Karangnom), dan sebelah Barat (Ds. Dalangan, Kecamatan Tulung). Desa Ponggok memiliki luas mencapai 77,2255 Ha, yang terbagi menjadi 4 (empat) pedukuhan (dusun) dan terbagi menjadi 6 RW dan RT, yaitu Pedukuhan Ponggok, Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari. Secara administrasi wilayah, Umbul Ponggok berada di Desa Ponggok namun bukan aset milik Desa Ponggok, sebab umbul ponggok adalah sumber mata air yang fungsi utamanya untuk irigasi pertanian di bawah Kementerian PU Pusat. BUM Desa Tirta Mandiri saat ini mengelola unit usaha pemandian umbul Ponggok, umbul ciblon, toko desa, penyewaan kios, penyewaan kolam ikan, dan pelayanan air bersih (PAB). Dari unit-unit usaha yang dijalankan, unit usaha pemandian umbul ponggok merupakan penghasil pendapatan paling besar yang diperoleh BUM Desa.

Desa Ponggok secara geografis memiliki lokasi strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena berada di posisi segitiga emas JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang). Desa Ponggok mengambil keuntungan dari Solo sebagai kota Vokasi dan Jogja sebagai kota

pelajar dan budaya, sebagai pusat pendidikan dan tujuan wisatawan. Dengan potensi desa yang dimiliki, Desa Ponggok mengembangkan potensi unggulan desa di sektor pertanian, perikanan, budaya dan sumber daya milik bersama berupa sumber mata air (meliputi; Ponggok, Kajen, Besuki, Sigedang, dan Kapilaler) sebagai destinasi desa wisata.

Pemerintah Desa dan BUM Desa mampu mengembangkan Umbul Ponggok menjadi destinasi desa wisata yang menyajikan berbagai keunikan, seperti; *snorkling*, berfoto dalam air bersama ikan-ikan maupun dengan perlengkapan unik (seperti; sepeda motor, sepeda, televisi) dan terdapat wahana ninja warior yang menjadi daya tarik para pengunjung/wisatawan. BUM Desa Ponggok kemudian menjadi viral dan dikenal secara nasional serta mendapat apresiasi sebagai salah satu BUM Desa terbaik dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa) karena menghasilkan milyaran rupiah dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa dari tahun 2013 hingga tahun 2016, BUM Desa Tirta Mandiri memiliki pendapatan Rp 211,267,700,00 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, setelah mengelola umbul ponggok, BUM Desa Tirta Mandiri telah mampu meningkatkan pendapatan dalam setiap tahunnya, yaitu Rp 1,153,075,730,00 pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi Rp 5,181,507,251,00 pada tahun 2015, dan naik dua kali lipat pada tahun 2016 menjadi Rp 10,300,000,000,00.

Ketentuan BUM Desa Ponggok Menjalankan Bisnis Usaha Desa

Kebijakan UU No 6/2014 tentang Desa telah mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memprioritaskan BUM Desa dalam

pengelolaan sumber daya alam di Desa (Pasal 90 huruf c). BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 87 Ayat 1, tambahan dalam penjelasan).

Spesifik, Permendes No 4/2015 tentang BUM Desa sebagaimana tindak lanjut UU No 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa (Pasal 2). Kegiatan ekonomi yang dijalankan BUM Desa antara lain; pemanfaatan sumber daya lokal (Pasal 19), bisnis penyewaan (renting) barang (Pasal 20), usaha perantara (brokering) (Pasal 21), usaha bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) (Pasal 22), bisnis keuangan (financial business) (Pasal 23), usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24). Pada konteks ini, BUM Desa menjalankan fungsi usaha bersama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (desa wisata alam) antara individu, kelompok, dan pemerintah desa (negara) untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa, meliputi: pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; organisasi pengelola BUM Desa; modal usaha BUM Desa; dan Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa (Pasal 5 Ayat 2). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal 5 Ayat 3). Secara struktur, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa (Pasal 9). Kepengurusan organisasi yang mengelola BUM Desa merupakan warga desa setempat.

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis (Pasal 2), salah satunya yakni pembentukan BUM Desa (Pasal 2 huruf e). Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (Pasal 5 ayat 1). Kewajiban masyarakat dalam peyelenggaraan Musyawarah Desa, diantaranya; mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa (Pasal 3 Ayat 3 huruf a), dan melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan pengambilan keputusan perihal kebijakan publik (Pasal 3 Ayat 3 huruf e).

Dalam ketentuan ideal peraturannya, mekanisme kerja aturan yang diberlakukan untuk semua sektor unit usaha sebagai akumulasi hasil pendapatan yang diperoleh

BUM Desa Tirta Mandiri berdasarkan AD/ART yang ditetapkan Pemerintah Desa Ponggok. Pembagian hasil usaha berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan, yaitu (1) hasil usaha dari pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto (bersih) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. (2) pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi sebagai berikut; (a) Disetor ke APBDes sebesar 30%, (b) Pemupukan Modal BUM Desa sebesar 25%, (c) Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan Pengurus 15%, (d) Cadangan modal sebesar 10%, (e) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10%, dan (f) Insentif Badan pengawas sebesar 10 %, (3) insentif diberikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor dan menjadi biaya insentif dikeluarkan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan Kelompok Perempuan Berbasis BUM Desa di Desa Ponggok

Pemerintah Desa Ponggok membuka akses untuk pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) melalui kemitraan untuk menjalankan bisnis usaha kecil mikro lokal khas desa di area umbul ponggok. Atas prakarsa Pemerintah Desa setempat, BUM Desa bermitra dengan kelompok perempuan (PKK) mengembangkan Usaha Kecil Mikro berupa makanan ringan olahan berbahan ikan nila untuk dijual kepada para pengunjung. Produk makanan ringan olahan berbahan ikan nila yang dihasilkan oleh kelompok perempuan (PKK) dimasukan pada tiket masuk pemandian Umbul Ponggok (Wawancara dengan IFSR, April 2019).

Desa Ponggok terbagi menjadi 4 (empat) pedukuhan (dusun) dan terbagi menjadi 6 RW dan RT, yaitu Pedukuhan Ponggok,

Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari. Kelompok Perempuan yang aktif dan produktif dalam produksi makanan ringan hanya 4 kelompok dan 2 kelompok tidak aktif (Wawancara dengan IFRN, April 2019). Produk makanan lokal khas desa yang dikembangkan Kelompok Perempuan, antara lain: pangsit, prastel, dan stik ikan nila. Produk makanan khas desa ini dijual menjadi satu paket dengan tiket masuk umbul ponggok dengan harga satuan per snack Rp 3.000,00. (Wawancara dengan IFRT, April 2019).

Masing-masing Kelompok Perempuan menyetor hasil olahan produk makanan yang dihasilkan kepada PPK Induk (Pusat) untuk dikepak dan dipasarkan untuk dijual di tempat tiket di umbul ponggok (Wawancara dengan IFRN, April 2019). PPK induk ini menghargai setiap kilo hasil produk makanan yang disetor dengan harga Rp 55.000,00 dan menjual satu bungkusnya Rp 3.000,00 setelah dikepak dan dijual di pintu masuk (tiketing) umbul ponggok (Wawancara dengan IFRT, April 2019). Tahun 2017, penjualan hasil produk makanan olahan lokal khas Desa Ponggok ini diperkirakan pernah mencapai Rp 1 Milyar dengan melihat jumlah pengunjung yang masuk ke objek wisata Umbul ponggok (Wawancara dengan IFKR, April 2019).

“Kemitraan” Antara Kelompok Perempuan (PKK) dan BUM Desa di Desa Ponggok

Ketentuan ideal peraturan Pemerintah Desa Ponggok bahwa mekanisme kerja aturan yang diberlakukan untuk semua sektor unit usaha sebagai akumulasi hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa Tirta Mandiri berdasarkan AD/ART yang ditetapkan Pemerintah Desa Ponggok. Pembagian hasil usaha berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan, yaitu (1) hasil usaha dari pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri

ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto (bersih) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, (2) pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi sebagai berikut; (a) Disetor ke APBDes sebesar 30%, (b) Pemupukan Modal BUM Desa sebesar 25%, (c) Insentif Komisaris, Dewan Komisaris, dan Pengurus sebesar 15%, (d) Cadangan modal 10%, (e) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10%, dan (f) **Insentif** Badan pengawas sebesar 10 %, (3) insentif diberikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor dan menjadi biaya insentif dikeluarkan pada tahun berikutnya.

Dalam prakteknya, keuntungan yang besar dari hasil usaha kemitraan antara BUM Desa dengan kelompok perempuan di umbul ponggok belum sama sekali memberikan kontribusi yang signifikan (pembagian pendapatan hasil usaha yang diperoleh) kepada BUM Desa (Wawancara dengan IFKR, April 2019). Situasi dan kondisi seperti ini, BUM Desa secara kelembagaan tidak diuntungkan sama sekali dalam bermitra karena tidak mendapatkan kontribusi tambahan bagi pendapatan BUM Desa dan secara khusus terhadap SHU yang akan disetor ke PADes (Wawancara dengan IFSR, April 2019). Tidak hanya itu, hasil keuntungan usaha kecil produk lokal khas desa yang dilakukan oleh kelompok perempuan bermitra dengan BUM Desa lebih cenderung didominasi oleh PPK induk (pusat) dari pada kelompok-kelompok perempuan yang dibina di tingkat paling bawah yang dilokasikan di dukuh. PPK induk mengontrol pembelian dan penjualan hasil produk olahan makanan mereka, sehingga kelompok perempuan paling bawah tidak secara langsung bisa mengemas dan mendistribusikan sendiri untuk dipasarkan di tempat desa wisata pemandian Umbul Ponggok (Wawancara dengan IFYN, April 2019).

KESIMPULAN

Pemberdayaan Kelompok Perempuan (PKK) berbasis BUM Desa dalam mengembangkan produk lokal khas desa dan desa wisata di Desa Ponggok belum menempatkan peran dan fungsi secara kelembagaan BUM Desa sebagai *social enterprise*. Pemberdayaan kelompok perempuan berbasis BUM Desa yang telah diterapkan dalam “kemitraan” dapat dikatakan hanya sebatas “tempat pemasaran-lapak” produk olahan khas desa ponggok yang secara otomatis diikuti langsung pada tiket masuk objek wisata umbul ponggok. Artinya, pendapatan hasil usaha yang diperoleh kelompok perempuan sebanding lurus dengan jumlah para pengunjung yang datang ke objek wisata umbul ponggok.

Faktanya, besarnya keuntungan dari hasil usaha yang telah diperoleh kelompok perempuan ternyata belum memberikan kontribusi (bagi hasil pendapatan) kepada BUM Desa. Padahal, sesuai aturan Perdes yang ditetapkan, BUM Desa memiliki tanggungjawab kepada Pemerintah Desa untuk memberikan kontribusi terhadap PADes sebesar 30% dari SHU yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Situasi dan kondisi seperti ini menjadi kendala serius dalam akselerasi kesejahteraan kelompok perempuan rentan lainnya, sebab masih banyak perempuan-perempuan (terutama keluarga rentan/miskin) yang belum dilibatkan dalam mengembangkan produk lokal khas desa yang perlu difasilitasi, dibina, dan diberdayakan secara sosial agar berdaya dan mampu menadiri, sehingga lebih sejahtera dan bisa hidup lebih layak.

SARAN

Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD perlu membuat aturan formal bagi hasil

(prosentase) kerjasama (kemitraan) antara BUM Desa dan PKK dalam menjalankan bisnis usaha secara kelembagaan. Dengan adanya aturan kerjasama dalam bermitra, BUM Desa dapat difungsikan sebagai *social enterprise* dalam memberikan tambahan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa yang lebih luas, sehingga dapat mendorong optimalisasi pelayanan dasar yang diselenggarakan (beasiswa pendidikan, BPJS kesehatann, Bantuan Bagi Warga Jompo) sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial warga desa. Ketentuan aturan ini dapat berupa Peraturan Desa (Perdes) sebagai kebijakan yang mengikat dalam pelaksanaan kemitraan antara BUM Desa dan Kelompok Perempuan (PKK).

Setelah Perdes kemitraan ini dibentuk, pemberdayaan kelompok perempuan dilakukan dari akar rumput (bawah), sehingga peran PKK Pusat (Induk) difungsikan sebagai pembina dan fasilitator. Dengan demikian, tindakan kongkret pemberdayaan kelompok-kelompok perempuan harus berpusat pada akar rumput (dari bawah) berbasis BUM Desa akan secara langsung dapat mengakselerasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial-yang pada akhirnya dapat menjadi ujung tombak pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga-keluarga miskin yang ada dari pada berpusat pada PKK Induk yang didominasi oleh keluarga-keluarga yang berekonomi mampu dan memiliki kedudukan sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kemenristekdikti atas Dana Hibah Peneliti Dosen Pemula (PDP) Tahun 2019 yang diberikan, sehingga penelitian ini terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan hasil publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, S. A. (2016). Strategi badan usaha milik desa tirta mandiri dalam pengelolaan objek wisata umbul ponggok di kecamatan polanharjo kabupaten klaten. *Adinegara*, 5(8).
- Borgaza, C., Galera, G., & Nogales, R. (2008). *Social enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation: an examination of the concept and practice in Europe and the Commonwealth of Independent States*. Bratislava, Slovak Republic: UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.
- Bungin, B. (2006). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danaresa, W., & Herawati, N. R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(1), 191–120.
- Eversole, R., Barraket, J., & Luke, B. (2014). Social enterprises in rural community development. *Community Development Journal*, 49(2), 245–261. <https://doi.org/10.1093/cdj/bst030>
- Hardijono, R., Maryunani, M., Yustika, A. E., & Ananda, C. F. (2014). Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 3(2), 21–30. <https://doi.org/10.9790/5933-03232130>
- Hariyanti, M., Hati, H., Wirastuti, A., & Susanto, K. (2015). *Berani Jadi Wirausaha Sosial? Membangun Solusi atas Permasalahan Sosial Secara Mandiri dan Berkelanjutan*. Diambil dari <https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/indonesia/social-good/Berani-jadi-SE-24Jun2015-final.pdf>
- Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Participation of Rural Youth in Business Development of BUMDes “Tirta Mandiri.” *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- Kementerian Keuangan. (2018). Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2018. Diambil dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800>
- Kementerian Pariwisata. (2014). PNPM Mandiri Pariwisata. Diambil dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=21&id=2504>
- Kompas. (2015). Kementerian Desa Targetkan 40.000 BUMDes Dibentuk Tahun Ini. *Kompas.com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/03565271/Kementerian.Des.Targetkan.40.000.BUMDes.Dibentuk.Tahun.Ini>
- Kompas. (2016). Contohlah Desa Ponggok, Setahun Hasilkan Rp 6,5 Miliar. *Kompas.com*. Diambil dari <https://regional.kompas.com/read/2016/09/27/06320091/contohlah.desa.ponggok.setahun.hasilkan.rp.6.5.miliar>
- Kompas. (2017a). Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Desa Tertinggal Dianggap

- Kurang. *Kompas.com*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/15251321/dana.rp.1.1.miliar.untuk.desa.tertinggal.dianggap.kurang>
- Kompas. (2017b). Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit. *Kompas.com*. Diambil dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *An Expedited Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (Second Edition). USA: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, M. (2012). Pengembangan Masyarakat Dengan Memanfaatkan Aset Lokal: Studi Deskriptif di Desa Mlatirejo & Desa Sendangmulyo Yang Berbatasan Dengan Hutan Jati. *Sosio Konsepsia*, 17(1), 101–115.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDesa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 10.
- Nyssens, M., Adam, S., & Johnson, T. (2006). *Social enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society*. London: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Prabowo, T. H. E. (2014). Developing Bumdes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice), 19–26. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4>
- Setyobakti, M. H. (2017). Identification of Business Enterprises Bumdes Based on Social and Economic Aspect. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, 14(2), 10.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Sidik, F. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3). <https://doi.org/10.31957/jeb.v5i3.498>
- Sidik, F., Abisono, F., & Herawati. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Untuk Memberdayakan Masyarakat Dengan Pendekatan “Hybrid Institutions.” *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8(01), 26. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1503>
- Sidik, F., & Nasution, F. G. A. (2018). *Village-Owned Enterprise (BUM Desa) As Economic Driver In Villages (A Case Study of Bumdes Sejahtera In Bleberan Village, Playen District, Gunungkidul Regency*. 8. Diambil dari http://scientific-journals.net/Journal/EKBIS/SEAMOLEC_AIC_1_79_BUSINESS_2016.pdf
- Sidik, F., Nasution, F. G. A., & Herawati, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Ponggok dan Kritik Terhadap Prestasi “Terbaik Nasional.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 5(2),

- 80–107. <https://doi.org/10.22146/jps.v5i2.44636>
- Sidik, F., Raharjo, T. P., & Parwoto, P. (2018). Pengelola Unit Usaha Vs Pengurus BUM Desa: Studi Kasus Pengelolaan Potensi Desa Wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 2(2). Diambil dari <http://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JPP/article/view/764>
- Sitepu, A. (2017). Organisasi Sosial Lokal: Profil, Peran dan Rekomendasi untuk Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Konsepsia*, 11(2), 11–23.
- Suastika, I. N. (2017). Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4), 4.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation In Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 58(1), 14.
- Suriadi, A., Rudjiman, Mahalli, K., Achmad, N., & Muda, I. (2015). The Applicative Model of The Village_Owned Enterprises (BUMDes) Development In North Sumatera. *European Centre for Research Training and Development UK*, 3(12), 48–62.
- Syawie, M. (2007). Peran Kelompok Sosial dalam Penguatan Ketahanan Sosial (Sebuah Kajian Modal Sosial di Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali). *Sosio Konsepsia*, 12(1), 45–51.
- Tempo. (2017). Ponggok Jadi Desa Wisata Terbaik, Ratusan Warganya Jadi Investor—Nasional Tempo.co.html. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/876100/pongkok-jadi-desa-wisata-terbaik-ratusan-warganya-jadi-investor>.
- The Jakarta Post. (2017a). *Govt announces progress in human development, cultural affairs*. Diambil dari <http://www.thejakartapost.com/adv/2017/10/27/govt-announces-progress-in-human-development-cultural-affairs.html>.
- The Jakarta Post. (2017b). *Ponggok: Example of independent village financially*. Diambil dari <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/24/pongkok-example-of-independent-village-financially.html>.
- Viva. (2016). Desa Wisata Tak Lagi Jadi Fokus Kementerian Pariwisata. *Viva.co.id*. Diambil dari <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/757120-desa-wisata-tak-lagi-jadi-fokus-kementerian-pariwisata>.
- Wiagustini, N. L. P. (2015). Partnership Strategy of Village Owned Enterprises (Village Credit Institutions and Village Markets) In Denpasar City, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, III(4), 1–20.
- Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulianto, T. (2017). BUMDes dan Ekonomi Kreatif. *Kompas*, hlm. 6.